

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LUMAJANG

Jl. Alun-alun Utara no. 7 Telp.(0334)8780990
LUMAJANG - 67316

KATA PENGANTAR

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan visi, misi dan pencapaian sasaran serta tujuan yang ditetapkan, berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026, diperlukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) sebagai dasar pelaksanaan tercapainya tugas pokok dan fungsi.

Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2024 yang terangkum dalam dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran di Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang.

Harapan kami dengan tersusunnya Rencana Kerja ini akan memberikan dukungan yang optimal dalam peningkatan kinerja kegiatan di Tahun 2024.

Lumajang, 25 Agustus 2023

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUMAJANG


MUSTAOIM, S.H.I. M.A
NIP. 198405182011011 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB. II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.	10
2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	21
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	39
2.6. Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah	41
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH...	46
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	46
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..	54
3.3. Program dan Kegiatan	56
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	73
4.1. Program Utama	73
4.2. Sasaran dan Indikator Kinerja	73
4.3. Alokasi Anggaran	75
BAB V : PENUTUP.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026, maka secara sinergi pula Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis PD (RPD) 2024-2026. Sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 7 ayat (1) Renstra-PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Atas dasar hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja yang telah tertuang dalam Rencana Strategis PD (RPD) 2024-2026. Untuk mengimplementasikan dan mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, maka perlu untuk ditetapkan dan disusun Rencana Kerja Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2024.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA PD adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA PD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran Renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis PD. Dengan demikian RENJA PD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA PD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan RENJA PD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk

mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh PD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA – PD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Undang – Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
6. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
12. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 100 Tahun 2018 tentang Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
14. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/P/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/P/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
16. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
19. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Publik ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Lumajang Kabupaten Lumajang ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023.
27. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender.
28. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang ;
29. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa ;
30. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Master Plan Pengembangan Smart City Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023 ;
31. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2020-2024 ;
32. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Satu Data Kabupaten Lumajang ;

33. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Komunikasi.
34. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026;
35. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2023 Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
36. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dimaksudkan sebagai bahan acuan atau dasar dalam penyusunan RKA APBD. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai tolak ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Meteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD,

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran RENJA Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai rencana kerja program dan kegiatan yang akan di laksanakan pada waktu jangka 1 (satu) tahun kedepan serta sumber pendanaan dan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun 2022 berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2022. Target dan Realisasi dapat di lihat pada tabel T-C.29 sebagai berikut :

Tabel 2.1 T.C-29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2022
Kabupaten Lumajang.

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2022			Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023					
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)					
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	%	100	N/A	100	100	100%	100	100%	
X	XX	1	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%	100	N/A	100	100	100%	100	100%	
X	XX	1	201	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	12	N/A	4	4	100%	4	8	67%
X	XX	1	201	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3	N/A	1	1	100%	1	2	67%
X	XX	1	201	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	6	N/A	2	1	50%	2	3	50%
X	XX	1	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	15	N/A	5	5	100%	5	10	67%
X	XX	1	201	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	72	N/A	24	20	83%	24	44	61%
X	XX	1	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	N/A	100	100	100%	100	100%	
X	XX	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	25	N/A	25	24	96%	25	25	100%
X	XX	1	202	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	36	N/A	12	12	100%	12	24	67%
X	XX	1	202	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	dokumen	36	N/A	N/A	12	N/A	N/A	12	33%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2022			Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023					
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)				
	SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
X	XX	1	202	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	18	N/A	6	5	83%	5	10	56%
X	XX	1	202	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	54	N/A	18	14	78%	18	32	59%
X	XX	1	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	%	100	N/A	100	100	100%	100	100	100%
X	XX	1	203	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	6	N/A	2	2	100%	N/A	2	33%
X	XX	1	203	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	2	N/A
X	XX	1	203	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	36	N/A	12	12	100%	12	24	67%
X	XX	1	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian PD	%	100	N/A	100	100	100%	100	100	100%
X	XX	1	205	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	6	N/A	2	2	100%	2	4	67%
X	XX	1	205	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	36	N/A	12	12	100%	12	24	67%
X	XX	1	205	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	6	N/A	3	3	100%	7	0	0%
X	XX	1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah	%	100	N/A	100	100	100%	100	100	100%
X	XX	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	30	N/A	10	10	100%	1	11	37%
X	XX	1	206	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	12	N/A	4	4	100%	3	7	58%
X	XX	1	206	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	paket	6	N/A	2	2	100%	2	4	67%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2022			Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023					
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)				
		Disediakan													
X	XX	1	206	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	3	N/A	1	1	100%	2	3	100%
X	XX	1	206	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	3	N/A	1	1	100%	12	3	100%
X	XX	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	6	N/A	2	3	150%	12	6	100%
X	XX	1	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah	%	100	N/A	100	100	100%	100	100	100%
X	XX	1	207	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	27	N/A	10	10	100%	23	0	0%
X	XX	1	207	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	3	N/A	1	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
X	XX	1	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	N/A	N/A	N/A	0%	N/A	N/A	N/A
X	XX	1	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	N/A	100	100	100%	N/A	N/A	N/A
X	XX	1	208	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	6	N/A	2	12	600%	12	3	50%
X	XX	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	9	N/A	12	12	100%	12	6	67%
X	XX	1	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	N/A	12	12	100%	12	12	100%
X	XX	1	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	N/A	100	100	100%	100	100	100%
X	XX	1	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	26	N/A	4	17	425%	28	26	100%
X	XX	1	209	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	unit	3	N/A	1	1	100%	1	2	67%
X	XX	1	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	54	N/A	3	3	100%	67	50	93%
X	XX	1	209	9	Pemeliharaan/RehabilitasiGedung	Jumlah Gedung Kantor dan	unit	1	N/A	1	N/A	100%	1	1	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2022			Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023				
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)			
		Kantor atau Bangunan Lainnya		Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi										
2	16	2		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase PPID yang telah diperbarui informasi publik	%	100	N/A	100	70,58	71%	100	100	100%
					Persentase Informasi yang diberitakan	%	100	N/A	100	99	99%	100	100	100%
2	16	2	201	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PPID yang telah diperbarui informasi publik	PPID	188	N/A	53	48	91%	53	100	53%
					Jumlah Informasi yang diberitakan melalui Media Komunikasi	berita	2000	N/A	410	410	100%	1200	1610	81%
2	16	2	201	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	7	N/A	3	3	100%	3	6	86%
2	16	2	201	3	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	28	N/A	12	12	100%	12	24	86%
2	16	2	201	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	24	N/A	12	12	100%	12	24	100%
2	16	2	201	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	24	N/A	6	12	200%	12	24	100%
2	16	2	201	6	Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	222	N/A	1	1	100%	12	13	6%
2	16	2	201	7	Layanan Hubungan Media	Layanan	144	N/A	23	4	17%	48	52	36%
2	16	2	201	8	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen	4	N/A	2	12	600%	12	4	100%
2	16	2	201	9	Manajemen Komunikasi Krisis	Dokumen	36	N/A	12	12	100%	48	24	67%
2	16	2	201	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Orang	180	N/A	60	60	100%	118	178	99%
2	16	2	201	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Dokumen	36	N/A	12	12	100%	12	24	67%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2022			Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023					
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)				
		Program atau Kebijakan													
2	16	2	201	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Unit	17	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	16	3			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase terbangunnya website perangkat daerah yang terpadu.	%	100	N/A	100	93,88	93,88	100	100	100%
2	16	3	201		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah domain dan sub domain yang dikelola	Domain dan Subdomain	1 domain dan 264 subdomain	N/A	1 domain dan 264 subdomain	1 domain dan 264 subdomain	100%	1 domain dan 264 subdomain	100	100%
2	16	3	201	1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Domain	1	N/A	1	1	100%	1	1	100%
2	16	3	201	2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	264	N/A	96	96	100%	96	192	73%
2	16	3	201	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	1	N/A	1	1	100%	1	1	100%
2	16	3	202		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah terbangunnya sistem elektronik yang terpadu	unit	1	N/A	1	1	100%	1	1	100%
2	16	3	202	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	98	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	16	3	202	2	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen	1	N/A	1	1	100%	4	0	0%
2	16	3	202	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pusat data pemerintah daerah yang dikelola	Unit	1	N/A	1	1	100%	1	1	100%
2	16	3	202	4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem	dokumen	1	N/A	N/A	1	N/A	N/A	1	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2022			Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023					
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)				
	Daerah (*)	Komunikasi Intra Pemerintah Daerah													
2	16	3	202	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi (*)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	dokumen	12	N/A	N/A	1	N/A	5	6	50%
2	16	3	202	6	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Perangkat Daerah	27	N/A	27	28	104%	28	27	100%
2	16	3	202	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	65	N/A	62	57	92%	65	33	51%
2	16	3	202	8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (*)	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	12	N/A	12	12	100%	12	12	100%
2	16	3	202	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	4	N/A	N/A	N/A	N/A	4	4	100%
2	16	3	202	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	N/A	1	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
2	16	3	202	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	16	3	202	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE (*)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	6	N/A	N/A	N/A	N/A	10	6	100%
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi	%	100	N/A	80	81,08	100%	100	100	100%
2	20	2	201		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi	data	37	N/A	28	28	100%	32	28	76%
2	20	2	201	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	12	N/A	12	12	100%	39	12	100%
2	20	2	201	2	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan	Orang	80	N/A	80	0	0%	80	80	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2022			Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023					
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)				
		Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi													
2	20	2	201	3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	28	N/A	28	28	100%	32	16	57%
2	20	2	201	4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Orang	28	N/A	N/A	N/A	N/A	40	N/A	N/A
2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	100	N/A	100	47	47%	100	100	100%
2	21	2	201		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	%	30	N/A	100	N/A	100%	100	N/A	N/A
2	21	2	201	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	21	2	201	2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	21	2	201	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	N/A	N/A	1	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
2	21	2	201	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	PD	30	N/A	N/A	N/A	N/A	5	N/A	N/A
2	21	2	202		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase PD yang menerapkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi	%	20	N/A	100	47	47%	100	100	100%
2	21	2	202	1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	30	N/A	20	23	115%	56	23	77%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang yang telah tertuang dalam Rencana Perangkat Strategis Perangkat Daerah (RPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026. Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel 2.2 T.C-30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang

NO	Indikator Tujuan / Sasaran Renstra PD	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9+6)/2	11	12	13
	Indeks SPBE			2,6- <3,5 (Baik)	3,50- <4,20 (Sangat Baik)	2,6- <3,5 (Baik)	2,6- <3,5 (Baik)	2,60 (Baik)	2,60 (Baik)	2,6- <3,5 (Baik)	2,6- <3,5 (Baik)	
1	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir			88%	90%	100%	100%	83,94%	87%	100%	100%	
2	Persentase PD pengguna sistem elektronik yang terpadu			90%	100%	100%	100%	93,88%	97%	100%	100%	
3	Persentase data statistik yang terintegrasi			80%	100%	86%	92%	81,08%	91%	86%	92%	
4	Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan pengamanan informasi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan			95%	100%	61,22%	81,63%	46,94%	73%	61,22%	81,63%	

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berikut ini isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang antara lain:

1. Belum ada kebijakan daerah terkait penyelenggaraan SPBE
2. Arsitektur dan peta rencana SPBE belum sesuai ketentuan yang berlaku
3. Penerapan Domain manajemen SPBE belum optimal sesuai ketentuan yang berlaku
4. Kurang optimalnya pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada Perangkat Daerah
5. Rendahnya kepatuhan Perangkat Daerah dalam memperbaharui daftar informasi publik di website
6. Kurangnya peningkatan kapasitas SDM pengguna sistem elektronik pada Perangkat Daerah
7. Kurang optimalnya pengelolaan komunikasi dan aspirasi publik
8. Kurangnya pengelolaan informasi publik dan media massa.
9. Kurang optimalnya penyebarluasan informasi pembangunan daerah
10. Kurang optimalnya tata kelola data dan statistik Daerah
11. Belum optimalnya penerapan satu data
12. Belum ditetapkannya SOP penyelenggaraan persandian
13. Belum optimalnya penyelenggaraan persandian daerah

Tabel 2.3
Pemetaan Permasalahan

NO.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	1.1	Belum ada kebijakan daerah terkait penyelenggaraan SPBE
			1.2	Arsitektur dan peta rencana SPBE belum sesuai ketentuan yang berlaku
			1.3	Penerapan Domain manajemen SPBE belum optimal sesuai ketentuan yang berlaku
			1.4	Kurang optimalnya pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada Perangkat Daerah
			1.5	Rendahnya kepatuhan Perangkat Daerah dalam memperbaharui daftar informasi publik di website
			1.6	Kurangnya peningkatan kapasitas SDM pengguna sistem elektronik pada Perangkat Daerah
			1.7	Kurang optimalnya pengelolaan komunikasi dan aspirasi publik
			1.8	Kurangnya pengelolaan informasi publik dan media massa.
			1.9	Kurang optimalnya penyebaran informasi pembangunan daerah
				<i>Urusan Statistik</i>
			1.10	Kurang optimalnya tata kelola data dan statistik Daerah
			1.11	Belum optimalnya penerapan satu data
				<i>Urusan Persandian</i>
			1.12	Belum ditetapkannya SOP penyelenggaraan persandian
			1.13	Belum optimalnya penyelenggaraan persandian daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam RKPD Tahun 2024 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel 2.4 T-C.31. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena ada perubahan SOTK pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Tabel 2.4 T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KABUPATEN LUMAJANG

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
X	X	X	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	98	%	4.468.834.569	Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100	%	3.909.899.352		
X	X	X	1	201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	98	%	15.046.350	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	98	%	14.146.000		
X	X	X	1	201	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	3.836.800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	dokumen	3.488.000	
X	X	X	1	201	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	3.218.050	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	3.038.000	
X	X	X	1	201	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen	2.585.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen	2.530.000	
X	X	X	1	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	5	Dokumen	940.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	5	Dokumen	1.030.000	

KODE					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting			
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Satuan	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
						Lumajang	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Lumajang	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
X	X	X	1	2017	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	4.466.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24	Laporan	4.060.000		
X	X	X	1	2022	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98	%	2.993.159.319	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98	%	2.716.673.926		
X	X	X	1	2022	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24/12	Orang/bulan	2.914.040.719	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	Orang/bulan	2.649.127.926		
X	X	X	1	2022	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	dokumen	58.000.800	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	dokumen	52.728.000		
X	X	X	1	2022	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dokumen	4.818.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	dokumen	0		
X	X	X	1	2022	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	2.362.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	dokumen	2.148.000		

KODE					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
X	X	X	1	202	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	14	Laporan	13.937.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18	Laporan	12.670.000	
X	X	X	1	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Persentase fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah	98	%	18.971.160	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Persentase fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah	98	%	9.430.000	
X	X	X	1	203	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen	4.098.160	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Dokumen	9.430.000	
X	X	X	1	203	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	4.500.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	Laporan	0	
X	X	X	1	203	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	10.373.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	Laporan	0	
X	X	X	1	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian PD	98	%	66.558.800	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian PD	98	%	28.100.000	
X	X	X	1	205	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Komunikasi dan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	2	paket	50.050.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Komunikasi dan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	1	paket	24.500.000	

KODE					Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
						Informatika Kab. Lumajang	Kelengkapan						Informatika Kab. Lumajang	Kelengkapan				
X	X	X	1	205	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	dokumen	3.960.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	dokumen	3.600.000	
X	X	X	1	205	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	orang	12.548.800	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	orang	-	
X	X	X	1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	98	%	402.716.072	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	98	%	338.353.738	
X	X	X	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14	paket	9.256.157	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	8.414.688	
X	X	X	1	206	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	paket	85.491.505	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	paket	77.719.550	
X	X	X	1	206	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	32.454.160	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	28.827.000	
X	X	X	1	207		Penyediaan	Dinas	Jumlah Paket	1	paket		Penyediaan	Dinas	Jumlah Paket	2	paket		

KODE					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting		
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp.000)			
	X		6		Bahan/Material	Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Bahan/Material yang Disediakan				4.479.750	Bahan/Material	Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Bahan/Material yang Disediakan				4.072.500	
X	X	X	1	206	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan	5.390.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan	5.600.000		
X	X	X	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	265.644.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	213.720.000		
X	X	X	1	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	98	%	181.941.829	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	98	%	74.043.688		
X	X	X	1	207	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	unit	173.941.829	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	39	unit	74.043.688		
X	X	X	1	207	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	unit	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	unit	0		
X	X	X	1	207	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	unit	8.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	unit	0		

KODE					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
						ng												
X	X	X	1	208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	98	%	514.703.200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	98	%	465.312.000		
X	X	X	1	208	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	176.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	460.000	
X	X	X	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	241.340.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	216.500.000	
X	X	X	1	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	273.187.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	248.352.000	
X	X	X	1	209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	98	%	297.154.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	98	%	263.840.000		
X	X	X	1	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17	unit	199.155.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27	unit	194.350.000	
X	X	X	1	209	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan	1	unit	7.909.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan	1	unit	7.190.000	

KODE					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
					Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	kasi dan Informatika Kab. Lumajang	dibayarkan Perizinannya				Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	kasi dan Informatika Kab. Lumajang	dibayarkan Perizinannya					
X	X	X	1	2019	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92	unit	79.200.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	98	unit	62.300.000	
X	X	X	1	2019	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	10.890.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	unit	-	
2	1	6	2			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Persentase PPID yang telah memperbarui informasi publik	82	%	380.294.200	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Persentase PPID yang telah memperbarui informasi publik	82	%		
							Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Persentase Informasi yang diberitakan	100	%	2.375.826.200		Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Persentase Informasi yang diberitakan	100	%	2.359.481.890	
2	1	6	2	2021		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah PPID yang telah memperbarui informasi publik	56	PPID	380.294.200	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah PPID yang telah memperbarui informasi publik	56	PPID	2.359.481.890	
							Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Informasi yang diberitakan melalui Media	1200	berita	2.375.826.200		Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Informasi yang diberitakan melalui Media	1200	berita		

KODE					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
						dan Informatika Kab. Lumajang	Komunikasi											
2	16	2	201	1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	2	Dokumen	15.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	2	Dokumen	14.270.000		
2	16	2	201	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	3	Dokumen	83.589.000	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	3	Dokumen	50.708.000		
2	16	2	201	3	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	12	Dokumen	163.405.000	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	12	Dokumen	143.790.000		
2	16	2	201	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12	Dokumen	281.358.000	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12	Dokumen	247.450.000		
2	16	2	201	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12	Dokumen	177.105.500	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12	Dokumen	156.612.750		
2	16	2	201	6	Pelayanan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1	Dokumen	116.052.200	Pelayanan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1	Dokumen	51.877.000		
2	16	2	201	7	Layanan Hubungan Media	Dinas Komunikasi dan	Jumlah Layanan Hubungan Media	4	Layanan	1.310.025.200	Layanan Hubungan Media	Dinas Komunikasi	Jumlah Layanan Hubungan Media	4	Layanan	1.009.018.000		

KODE	Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
2	16	2	201	8										
2	16	2	201	9										
2	16	2	201	10										
2	16	2	201	12										
2	16	2	201	13										
2	16	3												

KODE					Rancangan Awal RKPd						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
						Lumajang											
2	1	3	20		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah domain dan sub domain yang dikelola	1 dan 264	Domain dan Subdomain	170.592.400	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah domain dan sub domain yang dikelola	1 dan 264	Domain dan Subdomain	138.420.000	
2	1	3	20	1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	1	Domain	110.000	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	1	Domain	100.000	
2	1	3	20	2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	96	Dokumen	37.382.400	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	96	Dokumen	28.320.000	
2	1	3	20	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1	Unit	133.100.000	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1	unit	110.000.000	
2	1	3	20		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	jumlah terbangunnya sistem elektronik yang terpadu	65	unit	1.416.393.000	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	jumlah terbangunnya sistem elektronik yang terpadu	33	unit	921.676.000	
2	1	3	20	2	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	4	Dokumen	222.090.000	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	0	Dokumen	0	
2	1	3	20	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah pusat data pemerintah daerah	1	Unit	886.210.6	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah	1	Unit	811.996.0	

KODE					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
						kasi dan Informatika Kab. Lumajang	yang dikelola				00		kasi dan Informatika Kab. Lumajang	yang Dikelola			00	
2	1	3	20	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi (*)	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	5	Dokumen	20.904.400	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	4	Dokumen	1.200.000		
2	1	3	20	6	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	28	Perangkat Daerah	5.588.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	27	Perangkat Daerah	5.080.000		
2	1	3	20	10	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	65	Unit	152.240.000	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	33	Unit	98.000.000		
2	1	3	20	8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (*)	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	12	Layanan	110.000.000	0	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	0	0	Layanan	-		
2	1	3	20	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	4	Dokumen	3.300.000	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	4	Dokumen	1.800.000		
2	1	3	20	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE (*)	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	12	Dokumen	16.060.000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	6	Dokumen	3.600.000		
2	2	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinas Komunikasi dan	Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi	100	%	216.287.500	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinas Komunikasi dan	Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi	86	%	146.625.000		

KODE					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
						Informatika Kab. Lumajang						Informatika Kab. Lumajang					
2	20	2	201		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi	37	data	216.287.500	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi	32	data	146.625.000	
2	20	2	201	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	12	Dokumen	46.667.500	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	12	Dokumen	42.425.000	
2	20	2	201	2	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	60	Orang	165.000.000	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	32	Dokumen	2.800.000	
2	20	2	201	3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	28	Dokumen	3.080.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	40	Orang	1.400.000	
2	20	2	201	4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	28	Orang	1.540.000	Pengembangan Infrastruktur	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Infrastruktur Statistik	1	unit	100.000.000	
2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Komunikasi dan Informa	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	60	%	81.052.400	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Komunikasi dan Informa	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	60	%	27.321.500	

KODE					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Satuan	Kebutuhan Dana (Rp.000)
						tika Kab. Lumajang					tika Kab. Lumajang						
2	2	2	20		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	75	%	67.037.300	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	75	%	14.743.000	
2	2	2	20	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1	dokumen	15.000.000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	5	Perangkat Daerah	14.743.000	
2	2	2	20	2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2	laporan	35.000.000	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Persentase PD yang menerapkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi	60	%	12.578.500	
2	2	2	20	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12	laporan	15.000.000	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	30	Perangkat Daerah	12.578.500	
2	2	2	20	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	8	PD	67.037.300		Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang					
2	2	2	20		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Persentase PD yang menerapkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi	60	%	14.015.100		Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang					
2	2	2	20	1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang	Jumlah Perangkat Daerah yang	30	PD	14.015.100		Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang					

KODE	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	kasi dan Informatika Kab. Lumajang	Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi			0		kasi dan Informatika Kab. Lumajang					
	JUMLAH					9.109.280.269						7.379.983.304	

Berdasarkan Uraian tabel 2.4 T-C.31, juga mendukung tentang program dan kegiatan yang mengacu pada pengarusutamaan gender Tahun 2024 yang terletak pada Program Informasi Dan Komunikasi Publik.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil Musrenbang mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat, seperti tersaji dalam Tabel 2.5(T.C-32).

Tabel 2.5. T-C.32
USULAN PROGRAM/KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
KABUPATEN LUMAJANG

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Aktivitas	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kabupaten Lumajang	Persentase PPID yang telah memperbarui informasi publik		
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lumajang	Jumlah PPID yang telah memperbarui informasi publik		
	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		
	Pelatihan Desain Grafis Desa Karangrejo	Desa Karangrejo Kecamatan Yosowilangun		KIM (10 orang)	Usulan Superprioritas Musrenbang Kecamatan Tahun 2024

2.6 Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah

Pada bagian ini diuraikan inovasi yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang pada tahun 2023. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang mempunyai beberapa inovasi yaitu:

1. LAPOR LUMAJANG ON AIR

a. Latar Belakang

Setelah sukses menggunakan saluran laporan atau keluhan warga melalui Grup Facebook Lapor Lumajang, kini Dinas Kominfo akan merilis satu inovasi lagi yang berkaitan dengan penyerapan opini dan aspirasi publik. Inovasi baru ini bernama Lapor Lumajang On Air. Nama inovasi ini terbentuk dari gabungan dua frasa yaitu frasa Lapor Lumajang dan frasa On Air. Inovasi yang dikembangkan pada Tahun 2020 ini merupakan sebuah program inovasi dari Diskominfo yang mencoba hadir untuk memberikan solusi bagi masyarakat yang ingin membuat sebuah laporan agar masyarakat pelapor segera mendapatkan solusi atas suatu permasalahan.

b. Tujuan

Frasa On Air merujuk kepada kegiatan siaran di udara melalui stasiun radio yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam hal ini Dinas Kominfo yaitu LPPL RSL (Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Lumajang). Sebagai radio yang melakukan siaran setiap hari, RSL sangat mungkin untuk menyerap opini publik dalam bentuk apapun misalnya laporan atau keluhan. LAPOR LUMAJANG ON AIR bertujuan untuk mempercepat proses tanggapan dari sebuah laporan agar masyarakat pelapor segera mendapatkan solusi atas suatu permasalahan. Selain itu, jangkauan dari laporan ini akan menjadi lebih luas karena segmentasi pendengar RSL bisa berbeda dengan segmentasi pembaca FB Grup Lapor Lumajang

c. Alur pelaksanaan

Frasa Lapor Lumajang merujuk kepada saluran lapor yang sudah dimiliki sebelumnya yang menggunakan platform Facebook

Group. Dalam grup ini warga melapor dengan cara menuliskan laporannya di dinding grup Lapor Lumajang untuk kemudian ditanggapi oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.

d. Kendala

LAPOR LUMAJANG ON AIR merupakan gabungan dari kedua fasilitas pelaporan publik ini. Untuk merealisasikan program ini perlu ada kesepakatan dari dua bidang yang ada di Dinas Kominfo yaitu Bidang Informasi Publik (BIP) dan Bidang Komunikasi Publik (BKP). Setiap laporan yang masuk dalam FB Grup Lapor Lumajang akan menjadi *feed* (umpan) bagi penyiar radio untuk dibacakan dan diperdengarkan kepada pemirsa RSL. Bila memungkinkan, penyiar radio akan langsung menghubungi pejabat yang berwenang untuk memberikan tanggapan terhadap laporan tersebut. Semua rekaman tanggapan akan disimpan dan di-*publish* di website www.laporlumajang.com untuk dibaca masyarakat.

2. GUINEMA

a. Latar Belakang

Guided News Maker bisa disebut GUINEMA merupakan inovasi untuk membuat berita terpandu. Aplikasi ini diperuntukan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) yang hingga kini masih lemah dalam hal penulisan berita dan berakibat minimnya pasokan berita atau informasi dari KIM. Inovasi yang dikembangkan pada Tahun 2020 ini merupakan singkatan dari *Guided News Maker* adalah sebuah program inovasi dari Diskominfo yang mencoba hadir untuk memberikan solusi bagi masyarakat yang ingin meningkatkan kemampuan menulis dan masih lemah dalam hal penulisan berita terutama untuk KIM.

b. Tujuan

Tujuan aksi perubahan ini dirumuskan menjadi tiga tujuan yaitu: Tujuan Jangka Pendek, Tujuan Jangka Menengah, dan Tujuan Jangka Panjang. KIM adalah kelompok masyarakat yang sama sekali tidak memiliki bekal kemampuan jurnalistik atau tulis

menulis berita, oleh karena itu perlu sebuah terobosan inovasi untuk mengatasi problem tersebut. Inovasi yang diajukan berbentuk aplikasi yang dinamakan “Guided News Maker” (Guinema) atau pembuat berita terpandu. Dengan aplikasi ini, masalah ketidakmampuan KIM dalam menulis berita akan teratasi. Meskipun tidak memiliki latar belakang pendidikan jurnalistik, KIM akan bisa membuat berita dengan mudah. aplikasi “Guided News Maker” ini sebagai terobosan inovasi dengan berbagai alasan. Aplikasi ini akan sangat membantu para anggota KIM untuk menulis berita bahkan tanpa kemampuan jurnalistik sekalipun.

c. Manfaat

Aplikasi ini akan memudahkan KIM dalam memproduksi sebanyak-banyaknya informasi tanpa harus merasa kesulitan dalam menyusun berita. Karena banyaknya keluhan yang dihadapi oleh KIM saat membuat berita. Dengan inovasi berupa aplikasi Guided News Maker (GUINEMA), KIM yang awalnya kesulitan dalam membuat berita, kini mereka lebih bisa membuat berita yang bagus baik secara isi, organisasi paragraf, maupun tata bahasa.

d. Alur pelaksanaan

Aplikasi Guinema ini adalah aplikasi dimana pengguna dipandu untuk membuat berita. Dalam aplikasi ini terdapat kerangka berita yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh pengguna dengan cara menjawab yang sudah dicontohkan serta terdapat icon untuk menambahkan foto sehingga memberikan kesan yang pas. Setelah selesai, maka pengguna akan menerima berita yang sudah jadi dengan cara mengunduhnya terlebih dahulu melalui aplikasi Guinema tersebut. Aplikasi Guinema log-in melalui email masing-masing, setelah selesai membuat berita maka akan ada pemberitahuan dari email yang berupa berita sudah tersusun rapi.

3. SILANG (INFORMASI KEHILANGAN)

a. Latar Belakang

Radio Suara Lumajang sebagai LPPL menangkap kebutuhan masyarakat atas pelayanan publikasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di antaranya adalah kebutuhan publikasi berita kehilangan di media massa (radio) sebagai salah satu syarat untuk pengurusan dokumen pribadi yang hilang. Inovasi yang dikembangkan pada Tahun 2021 ini merupakan singkatan dari Informasi Kehilangan adalah sebuah program inovasi dari Diskominfo yang mencoba hadir untuk memberikan solusi bagi masyarakat yang ingin menyebarkan informasi kehilangannya ke masyarakat luas dengan harapan dokumen yang hilang bisa ditemukan.

b. Manfaat

Hasil dari Program Pelayanan Informasi Berita Kehilangan ada 2 manfaat, yaitu masyarakat dengan mudah bisa menyebarkan informasi kehilangannya ke masyarakat luas dengan harapan dokumen yang hilang bisa ditemukan, manfaat yang kedua adalah masyarakat bisa memperoleh dokumen bukti siar di radio sebagai syarat untuk mengurus atau membuat dokumen pribadi yang hilang.

c. Alur pelaksanaan

Masyarakat yang ingin melakukan pengurusan dokumen pribadi yang hilang bisa langsung datang ke Radio Suara Lumajang (RSL) sambil mengisi dokumen persyaratan administrasi yang dipersyaratkan supaya bisa memperoleh dokumen bukti siar di radio sebagai syarat untuk mengurus atau membuat dokumen pribadi yang hilang.

d. Kendala

Program Pelayanan Informasi Berita Kehilangan yang merupakan fasilitas pelaporan publik ini selama pelaksanaannya tidak terdapat kendala sama sekali dikarenakan pelayanan ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan.

Setiap laporan yang masuk dalam Pelayanan Informasi Berita Kehilangan akan menjadi *feed* (umpan) bagi penyiar radio untuk dibacakan dan diperdengarkan kepada pemirsa RSL.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Terdapat tiga isu strategis berskala nasional yang dibahas dalam bagian ini, meliputi: (a) Percepatan Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Timur, (b) Ketahanan Pangan Nasional, dan (c) Penerapan Standar Pelayanan Minimal/SPM. Disamping itu, juga memuat prioritas program prioritas dari Nasional antara lain:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan Pendidikan
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas
6. Ekonomi hijau
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi

Penentuan isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Beberapa isu strategis berskala Provinsi Jawa Timur meliputi : Kebijakan RPJPN 2005-2025 tersebut memberikan tantangan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan daya saing daerah berbasis potensi lokal melalui keunggulan kompetitif perekonomian, SDA, SDM dan kemampuan IPTEK yang tinggi. Guna melaksanakan pembangunan nasional dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan yang berkualitas diperlukan kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil yang didukung kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi; dan tetakelola dan reformasi birokrasi. Guna mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka diperlukan rumusan

Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Provinsi Jawa Timur 2019-2024. Strategi Pembangunan dikategorikan menjadi dua, yaitu: Strategi Umum dan Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran. Strategi Umum merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana bagaimana Visi dan Misi pembangunan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Sedangkan Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD akan dicapai.

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

3.1.1. Program Prioritas Nasional

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

3.1.2. Program Prioritas Provinsi

1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata;

2. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur;
3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan;
4. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
5. Peningkatan kemandirian pangan, dan pengelolaan sumber daya energi;
6. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup;
7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur.

b) Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang

Kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum di dalam RPD Kabupaten Lumajang Tahun 2024 – 2026 dan berdasarkan penjabaran tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang yaitu Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi.

Arah Kebijakan PD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang antara lain :

1. Penguatan ekonomi melalui peningkatan sektor pertanian, perindustrian, dan pariwisata;
2. Penguatan konektivitas wilayah untuk menjamin pemerataan pembangunan;
3. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia ;
4. Peningkatan infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar;
5. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup;
6. Peningkatan kondusivitas wilayah serta kualitas pelayanan publik.

Telaahan Rentra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota

Pemersalahan Pelayanan SKPD Provinsi/ Kabupaten/ Kota Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Tabel 3.1

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Masih adanya kesenjangan komunikasi sosial dan teknologi informasi di masyarakat antara provinsi besar dengan provinsi yang masih tertinggal	Masih terjadinya kesenjangan di bidang komunikasi sosial dan teknologi informasi (digital device) di masyarakat khususnya antara desa dan kota	Terbatasnya sumberdaya manusia yang terampil dan professional Kurangnya kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dan Database SKPD Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK Belum ada aturan baku yang mengatur urusan bidang komunikasi dan informatika seperti website, hosting dan colocation dll. Belum optimalnya layanan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi	Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik Pengembangan muatan e-Government Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik
2.	Belum meratanya penyebaran teknologi informasi di daerah perbatasan dan terpencil	Belum optimalnya penyebarluasan informasi kepada masyarakat		
3.	Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		
4.	Belum siapnya daerah dalam menyusun rencana induk tata kelola TIK	Belum adanya Rencana Induk Tata Kelola TIK (Perpres No. 81 tahun 2010 tentang Grand Design		

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025)		

Rumusan Strategi Umum selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 dijelaskan bahwa Arah Kebijakan dalam RPJMD menjelaskan tahapan pembangunan tahunan (milestone) Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024. Pada pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024, dokumen RPJMD ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan dan disusun setiap tahun. Dokumen RKPD memuat program prioritas dari Provinsi antara lain;

1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata
2. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan Infrastruktur
3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan
4. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian
5. Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi
6. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup
7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur

c. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

KLHS RPJMD pada prinsipnya menilai kebijakan, rencana dan program dalam RPJMD yang lebih memperhatikan aspek keberlanjutan. Capaian tujuan pembangunan berkelanjutan Kabupaten Lumajang, perumusan skenario maupun rekomendasinya dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo Kabupaten Lumajang dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 3.2
Telaah KLHS

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target TPB	Indikator TPB	Data capaian	Strategi pencapaian	Program
Tujuan 16 : Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(c) Persentase penggunaan <i>E-procurement</i> terhadap belanja pengadaan.	Capaian 73,96. Belum terpenuhi untuk menjadi 80%	Mengembangkan <i>E-procurement</i> dengan memperluas akses kepada semua Masyarakat	Penyediaan fasilitas bagi masyarakat untuk dapat mengakses <i>E-procurement</i> Peningkatan fasilitas pelayanan <i>E-procurement</i> Penyuluhan untuk mengedukasi masyarakat mengenai <i>E-procurement</i>

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target TPB	Indikator TPB	Data capaian	Strategi pencapaian	Program
Tujuan 17: Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang	17.19.2.(c) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	100%, walaupun menurun dari tahun sebelumnya 108,11	1.a Memperluas akses data dan informasi pemerintah kepada masyarakat melalui website 1.b Meningkatkan layanan website agar mudah diakses oleh masyarakat	Penyediaan fasilitas internet yang menjangkau semua wilayah Penyuluhan mengenai website pemerintah Penyuluhan mengenai webdite pemerintah Penyuluhan untuk edukasi masyarakat terkait dengan website pemerintah sebagai media bertukar informasi
	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1* Proporsi individu yang menggunakan internet.		Penambahan jaringan Internet Peningkatan kecepatan jaringan internet Penyediaan fasilitas internet murah	Mempertahankan program dan kegiatan yang sebelumnya sudah ada

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadidasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan strategis yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang adalah **Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi.** Sedangkan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang adalah Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK yang terpadu, Meningkatnya Layanan Data dan Statistik Daerah, Meningkatnya Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah, Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi public. Berikut ini merupakan program prioritas Daerah Kabupaten Lumajang dalam Tujuan Strategis Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif tahun 2024 yaitu Program Aplikasi Informatika.

Berdasarkan program prioritas Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2024 tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang merupakan dalam kaitannya dengan misi Kabupaten Lumajang 2024-2026 dapat mendukung melalui program Peningkatan layanan infrastruktur pendukung ekonomi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

b. Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika

Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan yang sesuai dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Lumajang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	FORMULA	TARGET TAHUN 2024
Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks SPBE	Angka	Indeks SPBE diperoleh dari hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB berdasarkan peraturan yang berlaku	2,6-<3,5 (Baik)

b. Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika

Adapun sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan yang sesuai dengan Perubahan RPJMD Kabupaten dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RPD) Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK yang terpadu;
2. Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik
3. Meningkatnya Layanan Data dan Statistik Daerah
4. Meningkatnya Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Indikator, Formula dan Target Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Target 2024
1	2	3	4	5
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK yang terpadu	Persentase Perangkat Daerah pengguna sistem elektronik yang terpadu	%	$\frac{\text{Jumlah PD pengguna sistem elektronik yang terpadu}}{\text{Jumlah PD yang ada}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Sistem elektronik yang terpadu adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna dilingkup Pemerintahan dan Masyarakat</p>	100%
Meningkatnya Layanan Data dan Statistik Daerah	Persentase data statistik yang terintegrasi	%	$\frac{\text{Jumlah bidang data yang sudah terintegrasi}}{\text{Jumlah Bidang data}} \times 100\%$ <p>Penjelasan: bidang data adalah data penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berjumlah 37 bidang data berdasarkan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Lumajang No 66 tahun 2020 pasal 16 ayat (2). bidang data yang terintegrasi adalah Integrasi Data merupakan proses kombinasi beberapa Data dari berbagai sumber untuk menghasilkan informasi terpadu yang dilaksanakan oleh Walidata melalui pemanfaatan teknologi Informasi, yang infrastruktur jaringannya disediakan oleh Walidata sesuai Peraturan Bupati Lumajang No 66 tahun 2020 pasal 18.</p>	86%
Meningkatnya Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan pengamanan informasi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan	%	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang telah melaksanakan pengamanan informasi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan}}{\text{Jumlah Total Perangkat Daerah}} \times 100\%$ <p>Penjelasan: Perangkat daerah yang menerima dan mengirim informasi melalui jaring telekomunikasi sandi diantaranya melalui email, fax, HT dan memiliki SOP penyelenggaraan persandian</p>	61,22%
Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir	%	$\frac{\text{Jumlah informasi publik yang tersedia}}{\text{Jumlah informasi publik yang harus didiseminasikan}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Perbup Nomor 13 Tahun 2023 tentang pedoman pelayanan informasi dan dokumentasi dan Perki nomor 1 tahun 2021 daftar informasi publik yang harus didiseminasikan adalah jenis informasi berkala sesuai perbup nomor 13 tahun 2023</p>	100%

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Keseluruhan program yang akan diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (RPD) Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026. Guna mewujudkan program-program yang telah ditetapkan, disusunlah kegiatan indikatif untuk memperlancar tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi.

Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah :

1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik dengan kegiatan:
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Dengan Sub Kegiatan:

- a) Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
- b) Pelayanan Informasi Publik
- c) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
- d) Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan
- e) Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
- f) Manajemen Komunikasi Krisis
- g) Layanan Hubungan Media
- h) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
- i) Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
- j) Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- k) Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- l) Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

2. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan kegiatan:

a) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan sub kegiatan:

Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

b) Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Dengan sub kegiatan:

Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Aplikasi Informatika dengan kegiatan :

Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota:

Dengan Sub Kegiatan:

a) Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota

b) Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

c) Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

d) Pengelolaan *e-government* Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

e) Dengan Sub Kegiatan:

f) Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

g) Penatalaksanaan dan Pengawasan *e-government* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

h) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

i) Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik

j) Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah

- k) Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
- l) Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
- m) Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
- n) Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
- o) Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
- p) Pengelolaan *Government Chief Information Officer (GCIO)*
- q) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan kegiatan:
 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Dengan Sub Kegiatan :

- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral
- b) Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
- c) Membangun Metadata Statistik Sektoral
- d) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
- e) Pengembangan Infrastruktur
- f) Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan:

A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- e) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- f) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

- a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- b) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

- a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- b) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- c) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- d) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- e) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- f) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

E. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- d) Penyediaan Bahan/Material
- e) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

- a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- b) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
- c) Pengadaan Mebel
- d) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Tabel 3.4 TC-.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Lumajang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
									Rp 7.818.783.304				
2.16.01	Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	(Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang dipenuhi : Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang direncanakan) x 100			Dinas Kominfo	100%	Rp 3.916.458.914	DAU/AP BD		100%	4.308.104.805
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	(Jumlah fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dipenuhi : Jumlah fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang direncanakan) x 100%			Dinas Kominfo	100%	Rp 12.870.000	DAU/AP BD		98%	14.157.000
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun pada tahun n	Menyusun Dokumen Renstra, Dokumen P Renstra, Dokumen Renja, Dokumen P Renja	1	Dinas Kominfo	4 Dokumen	Rp 2.850.000	DAU/AP BD		4 Dokumen	3.135.000
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Penyusunan dokumen Dokumen RKA SKPD	1	Dinas Kominfo	1 Dokumen	Rp 2.400.000	DAU/AP BD		1 Dokumen	2.640.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
				pada tahun n									
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun pada tahun n	<i>Menyusun Dokumen Perubahan RKA SKPD, Dokumen Pergeseran RKA SKPD</i>	1	Dinas Kominfo	2 Dokumen	Rp 2.530.000	DAU/AP BD		2 Dokumen	2.783.000
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada tahun n	<i>Menyusun Laporan LKjIP Tahunan, Laporan LKjIP TW I, Laporan LKjIP TW II, Laporan LKjIP TW III, Laporan LKjIP TW IV</i>	1	Dinas Kominfo	5 Laporan	Rp 1.030.000	DAU/AP BD		5 Laporan	1.133.000
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun pada tahun n	<i>Menyusun Laporan Evaluasi Renja TW 1, TW II, TW III, TW IV/Laporan Evaluasi Interim TW I, II,III,IV/Laporan IKM Semester I, Semester II</i>	1	Dinas Kominfo	10 Laporan	Rp 4.060.000	DAU/AP BD		24 Laporan	4.466.000
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(Jumlah fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi : jumlah fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan) x 100%			Dinas Kominfo	100%	Rp 2.709.953.926	DAU/AP BD		98%	2.980.949.319
2.16.01.2	Penyediaan Gaji	Tersedianya Gaji dan	Jumlah Orang	Jumlah Orang yang	<i>Jumlah ASN</i>	1	Dinas	24	Rp	DAU/AP		25	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
.02.01	dan Tunjangan ASN	Tunjangan ASN	yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun n	<i>yang mendapat Gaji dan tunjangan Bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei Juni, Juli Agt, Sep, Okt, Nop, Des</i>		Kominfo	Orang/bulan	2.649.127.926	BD		Orang/bulan	2.914.040.719
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disusun pada tahun n	<i>Menyusun Dokumen pelaksanaan tugas ASN Bulan Januari, Peb, Maret, Apr, Mei, Juni, Juli, Agt, Sep, Okt, Nop, Des,</i>	1	Dinas Kominfo	12 DOKUMEN	Rp 52.728.000	DAU/APBD		12 DOKUMEN	58.000.800
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Menyusun LO, LRA, Neraca, LPE, CALK</i>	1	Dinas Kominfo	1 Laporan	Rp 1.978.000	DAU/APBD		5 Laporan	2.175.800
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun pada tahun n	<i>Laporan keuangan bulanan, dan Laporan semester</i>	1	Dinas Kominfo	12 Laporan	Rp 6.120.000	DAU/APBD		18 Laporan	6.732.000
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tepenuhinya fasilitasi administrasi Barang Milik Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	(Jumlah fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah yang dilaksanakan : Jumlah fasilitasi Administrasi BMD			Dinas Kominfo	100%	Rp 5.345.000	DAU/APBD		98%	5.879.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
				Perangkat Daerah yang direncanakan) x 100%									
2.16.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun pada tahun n	Laporan penatausahaan BMD Bulan Januari sd Desember	1	Dinas Kominfo	12 laporan	Rp 5.345.000	DAU/AP BD		12 laporan	5.879.500
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	(Jumlah fasilitasi administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang dipenuhi : Jumlah fasilitasi administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang direncanakan) x 100%			Dinas Kominfo	100%	Rp 133.600.000	DAU/AP BD		98%	146.960.000
2.16.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang disusun pada tahun n	Menyusun Dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian Bulan Januari, Peb, Maret, Apr, Mei, Juni, Juli, Agt, Sep, Okt, Nop, Des,	1	Dinas Kominfo	12 Dokumen	Rp 3.600.000	DAU/AP BD		12 Dokumen	3.960.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan pada tahun ke n		1		25 orang	Rp 130.000.000		ditambahkan sub kegiatan baru di renja dan aktivitas baru di renja		143.000.000
					Bimtek			25	Rp				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					<i>implementasi sistem manajemen informasi dan komunikasi</i>			orang	130.000.000				
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah	(Jumlah fasilitasi Administrasi Umum PD yang dilaksanakan : Jumlah fasilitasi Administrasi Umum PD yang direncanakan) x 100%			Dinas Kominfo	100%	Rp 332.797.988	DAU/AP BD		98%	366.077.787
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun n	<i>Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	1	Dinas Kominfo	1 Paket	Rp 8.414.688	DAU/AP BD		2 Paket	9.256.157
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun n				3 paket	Rp 77.719.550				
					<i>Pembelian barang pakai habis alat tulis kantor</i>	1		1 paket	Rp 67.382.550	DAU/AP BD		1 paket	74.120.805
					<i>Pembelian barang pakai habis alat kebersihan dan bahan pembersih</i>	2	Dinas Kominfo	1 paket	Rp 8.337.000	DAU/AP BD		1 paket	9.170.700
					<i>Pembelian barang pakai habis penyediaan materai</i>	3		2 paket	Rp 2.000.000	DAU/AP BD		2 paket	2.200.000
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	<i>Paket Penyediaan barang cetakan serta proses</i>	1	Dinas Kominfo	2 Paket	Rp 28.871.250	DAU/AP BD		2 Paket	31.758.375

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
				pada tahun n	<i>penggunaan</i>								
2.16.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	<i>Pembelian/ penyediaan bahan bakar mesin dan pelumas</i>	1	Dinas Kominfo	2 paket	Rp 4.072.500	DAU/AP BD		2 paket	4.479.750
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang disusun pada tahun n				12 Laporan	Rp 213.720.000				
					<i>Fasilitasi pelaksanaan dinas luar daerah dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi skpd</i>	1			Rp 187.380.000	DAU/AP BD			206.118.000
					<i>Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi skpd</i>	3	Dinas Kominfo	12 Laporan	Rp 13.500.000			12 Laporan	14.850.000
					<i>Fasilitasi pelaksanaan dinas dalam daerah dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi skpd</i>	2			Rp 12.840.000	DAU/AP BD			14.124.000
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase fasilitas pengadaan BMD	(Jumlah Barang Milik Daerah yang dipenuhi : Jumlah Barang Milik Daerah yang direncanakan) x 100			Dinas Kominfo	100%	Rp -	DAU/AP BD		98%	-
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Jumlah fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi : Jumlah fasilitas Jasa Penunjang Urusan			Dinas Kominfo	100%	Rp 464.852.000	DAU/AP BD		98%	511.337.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
				Pemerintahan Daerah yang direncanakan) x 100%									
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun n				12 Laporan	Rp 216.500.000				
						1	Dinas Kominfo	12 Laporan	Rp 180.000.000	DAU/AP BD		12 Laporan	198.000.000
					2	Rp 600.000			DAU/AP BD		660.000		
					3	Rp 3.500.000			DAU/AP BD		3.850.000		
					4	Rp 2.400.000			DAU/AP BD		2.640.000		
					5	Rp 15.600.000			DAU/AP BD		17.160.000		
					6	Rp 14.400.000					15.840.000		
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun n				12 Laporan	Rp 248.352.000				
						1	Dinas Kominfo	12 Laporan	Rp 184.800.000	DAU/AP BD		12 Laporan	203.280.000
					2	Rp			DAU/AP				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					premi asuransi kesehatan bagi non asn.				56.760.000	BD			62.436.000
					Pembayaran premi asuransi ketenagakerjaan bagi non asn.	3			Rp 6.192.000	DAU/AP BD			6.811.200
					Pembayaran jasa pengolahan sampah, pembayaran iuran pengolahan sampah.	4			Rp 600.000	DAU/AP BD			660.000
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	(Jumlah Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan : Jumlah Barang Milik Daerah yang direncanakan pemeliharaan) x 100%			Dinas Kominfo	100%	Rp 257.040.000	DAU/AP BD		98%	282.744.000
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun n				18 unit	Rp 182.350.000				200.585.000
					Pembelian BBM dan pelumas untuk kendararan dinas dan kendaraan operasional atau lapangan	1	Dinas Kominfo	1 Unit	Rp 104.250.000	DAU/AP BD		1 Unit	114.675.000
					Pembayaran jasa service kendaraan dinas dan kendaraan operasional atau	2		4 Unit	Rp 65.000.000	DAU/AP BD		4 Unit	71.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
					<i>lapangan</i>							
					<i>Pembayaran pajak kendaraan bermotor STNK roda 2 kendaraan operasional atau lapangan;</i>	3		14 Unit	Rp 2.800.000	DAU/AP BD		14 Unit 3.080.000
					<i>Pembayaran pajak STNK kendaraan bermotor roda 4 kendaraan operasional atau lapangan;</i>	4		1 unit kendaraan dinas, 3 unit kendaraan operasional	Rp 10.000.000	DAU/AP BD		1 unit kendaraan dinas, 3 unit kendaraan operasional 11.000.000
					<i>Pembayaran jasa kir kendaraan operasional atau lapangan</i>	5		4 Unit	Rp 300.000	DAU/AP BD		4 Unit 330.000
2.16.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya pada tahun n	<i>Pembayaran jasa pemeliharaan genset</i>	1	Dinas Kominfo	1 Unit	Rp 7.190.000	DAU/AP BD		7.909.000
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun n				86 unit	Rp 67.500.000			
					<i>Pemeliharaan peralatan 25 unit personal computer dan penggantian suku cadang.</i>	1		25 unit	Rp 17.500.000	DAU/AP BD		44 Unit 19.250.000
					<i>Pemeliharaan pendingin ruangan 15 unit</i>	2	Dinas Kominfo	15 Unit	Rp 9.000.000	DAU/AP BD		23 Unit 9.900.000
					<i>Service kamera dan Drone (pembelian alat kelengkapan publikasi)</i>	3		26 Unit	Rp 28.000.000	DAU/AP BD		26 Unit 30.800.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Pemeliharaan peralatan printer/ service printer	4		20 UNIT	Rp 13.000.000	DAU/AP BD		7 UNIT	14.300.000
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya jumlah informasi publik yang terbaru	Persentase PPID yang telah memperbarui informasi publik	(jumlah PPID yang telah memperbarui informasi publik : Jumlah PPID yang ada) x 100% Note: kriteria memperbarui untuk inblik yang terbaru				100%	Rp 2.474.281.890	DAU/AP BD		100%	2.721.710.079
			Persentase Informasi yang diberitakan	(Jumlah informasi yang diberitakan : Jumlah berita pada tahun n) x 100% Note: diberitakan dalam waktu 1x24 jam				100%					
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah Informasi yang diberitakan melalui media komunikasi	Jumlah PPID yang telah memperbarui informasi publik	Jumlah PPID yang telah memperbarui informasi publik Note: kriteria memperbarui untuk inblik yang terbaru pada tahun n				53 PPID	Rp 2.474.281.890	DAU/AP BD		53 PPID	2.721.710.079
			Jumlah Informasi yang diberitakan melalui Media Komunikasi	Jumlah Informasi yang diberitakan melalui Media Komunikasi Note: diberitakan dalam waktu 1x24 jam pada tahun n				1200 berita				1200 berita	
2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis				2 Dokumen	Rp 14.270.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
	dan Komunikasi Publik	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang disusun pada tahun									
					<i>Sosialisasi Perbup Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah nomor 5 tahun 2017 tentang pembentukan lembaga penyiaran publik lokal radio suara lumajang</i>	1		2 Dokumen	Rp 3.970.000	DAU/AP BD			
					<i>Rapat Koordinasi Komite Komunikasi Digital</i>	2			Rp 10.300.000	DAU/AP BD			
2.16.02. 2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik yang disusun pada tahun				3 Dokumen	Rp 29.108.000				
					<i>Belanja Gaji TKB</i>	1	Dinas Kominfo	3 Dokumen	Rp 20.400.000	DAU/AP BD	dikurangi 1 orang	2 orang 22.440.000	
					<i>Penanganan pengelolaan opini publik, aspirasi masyarakat, dan informasi Hoax</i>	2	Lumajang		Rp 2.720.000	DAU/AP BD		3 Dokumen	2.992.000
					<i>Koordinasi pengelolaan pengaduan publik</i>	3			Rp 3.600.000	DAU/AP BD			3.960.000
					<i>Penyusunan bahan tindak lanjut pengaduan publik</i>	4			Rp 888.000				
					<i>Monev Pengelolaan</i>	5			Rp 1.500.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					<i>pengaduan</i>								
2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi yang disusun pada tahun n Pemerintah Daerah				12 Dokumen	Rp 143.790.000				
					<i>Belanja Upah TKB (5 orang x 12 bulan)</i>	1			Rp 106.800.000	DAU/AP BD		117.480.000	
					<i>Peliputan kegiatan Pimpinan dalam rangka pencapaian Program Prioritas Berkelanjutan</i>	2	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	Rp 36.990.000	DAU/AP BD		12 Dokumen 40.689.000	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan yang disusun pada tahun n				12 Dokumen	Rp 204.250.000				
					<i>Belanja Upah TKB (8 orang x 12 bulan)</i>	1			Rp 166.800.000	DAU/AP BD	dikurangi 2 orang	183.480.000	
					<i>Pendokumentasian kegiatan Pimpinan, dan pembuatan konten media komunikasi publik</i>	2	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	Rp 37.450.000	DAU/AP BD DAU/AP BD		12 Dokumen 41.195.000 -	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi yang disusun pada tahun n				12 Dokumen	Rp 136.212.750				
					<i>Belanja Upah TKB (2 orang x</i>	1	Kabupaten	12 Dokumen	Rp 42.000.000	DAU/AP BD	dikurangi 1	12 Dokumen 46.200.	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
					12 bulan)		Lumajang	en			orang	en	000	
					Updating konten informasi komunikasi publik secara berkala	2			Rp 4.725.000	DAU/AP BD			5.197.500	
					publikasi kegiatan tematik scr periodik	3			Rp 7.875.000	DAU/AP BD			8.662.500	
					Pembuatan dan pemasangan media luar ruang	4			Rp 66.294.750	DAU/AP BD			72.924.225	
					Fasilitasi Media Daring Pimpinan (Tim Vidcon)	6			Rp 15.318.000	DAU/AP BD			16.849.800	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik yang disusun pada tahun n				1 Dokumen	Rp 51.877.000					
					Belanja Gaji TKB	1	Dinas Kominfo		Rp 21.600.000	DAU/AP BD			23.760.000	
					Koordinasi pelayanan informasi publik (Admin PPID Pelaksana)	2		1 Dokumen	Rp 13.122.000	DAU/AP BD		4 Dokumen	14.434.200	
					Pembinaan standart layanan informasi publik desa	3	Kabupaten Lumajang		Rp 17.155.000	DAU/AP BD			18.870.500	
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Tersedianya Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media yang dilaksanakan pada tahun n				4 layanan	Rp 1.009.018.000					
					Belanja Upah TKB (2 orang x 12 bulan)	1	Kabupaten Lumajang	4 layanan	Rp 40.800.000	DAU/AP BD			44.880.000	
					Honor PPTK	2			Rp 6.288.000	DAU/AP BD				6.916.800
					Kerjasama publikasi dan	3			Rp 376.000.000	DAU/AP BD				413.600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					promosi dengan media Online								.000
					Kerjasama publikasi dan promosi dengan media Cetak	4			Rp 200.000.000	DAU/AP BD			220.000.000
					Kerjasama publikasi dan promosi dengan media Elektronik (Radio dan Televisi)	5			Rp 280.000.000	DAU/AP BD			308.000.000
					Pemantauan pemberitaan media	6			Rp 17.330.000	DAU/AP BD			19.063.000
					Sarasehan dengan Awak Media	7			Rp 88.600.000	DAU/AP BD			97.460.000
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah dokumen kemitraan dengan pemangku kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan yang disusun pada tahun				12 Dokumen	Rp 132.426.140				
					Belanja Gaji TKB	1	Dinas Kominfo		Rp 21.600.000	DAU/AP BD			23.760.000
					Pelayanan pembayaran honorarium penanggungjawab pengelola keuangan		Dinas Kominfo		Rp 4.308.000	DAU/AP BD			#VALUE!
					Pembinaan KIM Desa di tiap-tiap kecamatan	3	Dilaksanakan di 7 kecamatan se Kabupaten Lumajang : PASIRIAN, LUMAJANG,	12 Dokumen	Rp 41.530.000	DAU/AP BD		12 Dokumen	45.683.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
							GUCIALIT, PADANG, RANDUA GUNG, SUMBER SUKO, dan YOSOWILANGUN						
					<i>Pelatihan Desain Grafis Desa Karangrejo</i>	2	Kecamatan Yosowilangun Desa Karangrejo		Rp 4.825.000	DAU/AP BD	Usulan Superprioritas tahun 2024		
					<i>Anugrah Pewarta Warga (APW)</i>	4	Kabupaten Lumajang		Rp 60.163.140	DAU/AP BD			66.179.454
2.16.02.2.01.09	Manajemen Komunikasi Krisis	Terlaksananya Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis yang disusun pada tahun n	<i>Siaran Pers terkait isu terindikasi krisis (Jumpa Pers)</i>	1	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	Rp 134.230.000	DAU/AP BD		48 Dokumen	147.653.000
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terlaksananya Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan yang disusun pada tahun n				12 Dokumen	Rp 246.100.000				
					<i>Belanja Upah TKB (4 Orang x 12 bulan)</i>	1	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	Rp 81.600.000	DAU/AP BD		12 Dokumen	89.760.000
				<i>Belanja lembur Siaran Radio</i>	2	Rp 6.375.000			DAU/AP BD	7.012.500			
				<i>Belanja Jasa Kantor</i>	3	Rp 38.900.000			DAU/AP BD	42.790.000			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
					<i>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</i>	4			Rp 31.500.000	DAU/AP BD		34.650.000
					<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5	Radio suara Lumajang		Rp 10.800.000	DAU/AP BD	4 Dokumen	11.880.000
					<i>Belanja Kawat/Faksimili /Internet/TV Berlangganan</i>	6	Radio suara Lumajang		Rp 9.600.000	DAU/AP BD		
					<i>Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan</i>	7	Radio suara Lumajang		Rp 4.600.000	DAU/AP BD		
					<i>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</i>	8	Radio suara Lumajang		Rp 15.000.000	DAU/AP BD		
					<i>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</i>	9	Radio suara Lumajang		Rp 15.650.000	DAU/AP BD		
					<i>Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh</i>	10	Radio suara Lumajang		Rp 6.875.000	DAU/AP BD		
					<i>Belanja Jasa Penyelenggara Acara</i>	11	Radio suara Lumajang		Rp 25.200.000	DAU/AP BD		
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disediakan pada tahun n				15 unit	Rp 373.000.000			
					<i>Pembelian Alat Kelengkapan Publikasi</i>	1	Dinas Komunikasi dan Informatika	14 unit	Rp 173.000.000	DAU/AP BD		
					<i>Rehab ruang command centre</i>	2	Dinas Komunikasi	1 unit	Rp 200.000.000	DAU/AP BD	cc room : 200	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					(CC Room)		si dan Informatika				juta (butuh RAB, peredam, kamar kecil, sound tanam, gordem timur, papan nama cc room, komputer cc room/komputer multimedia 1 buah (untuk operator cc room))		
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya terbangunnya website perangkat daerah yang terpadu.	Persentase terbangunnya website perangkat daerah yang terpadu.	(Jumlah website PD yang terpadu : Jumlah PD yang ada) x 100%				95%	Rp 1.254.096.000	1.060.096.000		100%	1.379.505.600
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah domain dan sub domain yang dikelola	Jumlah domain dan sub domain yang dikelola	Jumlah domain dan sub domain yang dikelola Pada tahun ke-n				1 Domain dan 264 Subdomain	Rp 308.420.000	DAU/APBD		1 Domain dan 264 Subdomain	339.262.000
2.16.03.2.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendaftaran Nama Domain	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah	Mendaftarkan Domain lumajangkab.go.i	1	Dinas Kominfo	1 Domain	Rp 100.000	DAU/APBD		1 Domain	110.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
		Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota Pada tahun ke-n	<i>d melalui website domain.go.id</i>								
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pada tahun ke-n	<i>Monitoring Domain dan Subdomain</i>	1	Dinas Kominfo	96 Dokumen	Rp 28.320.000	DAU/AP BD		96 Dokumen	31.152.000
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang diselenggarakan pada tahun ke - n				1 unit	Rp 280.000.000				
					<i>Pembayaran IP Publik</i>	1	Dinas Kominfo	256 IP	Rp 10.000.000	DAU/AP BD		256 IP	11.000.000
					<i>Pemeliharaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i>	2	Dinas Kominfo dan instansi terkait	1 unit	Rp 200.000.000	DAU/AP BD	ditambah 100 juta dari rehab cc room	8 titik	220.000.000
					<i>Pengadaan komputer jaringan</i>	3	Dinas Kominfo	2 unit	Rp 70.000.000		penambahan aktivitas baru		
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya jumlah sistem elektronik yang dikembangkan secara terpadu	jumlah terbangunnya sistem elektronik yang terpadu	jumlah sistem elektronik yang dikembangkan secara terpadu pada tahun n				33 unit	Rp 945.676.000	DAU/AP BD			1.040.243.600
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terkelolanya Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola pada Tahun ke-n				1 Unit	Rp 811.996.000				
					<i>pembayaran</i>	1	Dinas	1 Unit	Rp	DAU/AP		1 Unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					<i>upah pegawai analis sistem informasi dan jaringan & teknisi jaringan instalasi</i>		Kominfo		48.000.000	BD		52.800.000	
					<i>Pembayaran Honor PPTK</i>	1	Dinas Kominfo		Rp 5.736.000	DAU/AP BD		6.309.600	
					<i>Pengelolaan pusat data</i>	1	Dinas Kominfo		Rp 758.260.000	DAU/AP BD		834.086.000	
2.16.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi yang disusun pada tahun n	<i>Pertemuan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi keamanan informasi</i>	1	Dinas Kominfo	4 dokumen	Rp 1.200.000	DAU/AP BD		4 dokumen 1.320.000	
2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik pada tahun n	<i>Rapat Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Elektronik</i>	1	Dinas Kominfo	27 PD	Rp 5.080.000	DAU/AP BD		27 PD dan 8 Bagian Lingkup Setda 5.588.000	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan pada tahun n				33 unit	Rp 122.000.000				
					<i>Pembayaran upah pegawai analis sistem informasi dan teknisi produksi multimedia dan web</i>	1	Dinas Kominfo	33 unit	Rp 72.000.000	DAU/AP BD	ditambah 1 orang programmer	33 website 79.200.000	
					<i>Pemeliharaan aplikasi Administrasi</i>	2	Dinas Kominfo	1 aplikasi	Rp 50.000.000	DAU/AP BD		1 aplikasi 55.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					<i>Perkantoran Secara Elektronik (NADINE)</i>								
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Terlaksananya Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City pada tahun n	<i>Rapat koordinasi forum PD smart city</i>	1	Dinas Kominfo	4 dokumen	Rp 1.800.000	DAU/AP BD		4 dokumen	1.980.000
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE yang disusun pada tahun n	<i>Rapat kerja tim verifikasi internal evaluasi SPBE Pemkab. Lumajang</i>	1	Dinas Kominfo	6 dokumen	Rp 3.600.000	DAU/AP BD		6 dokumen	3.960.000
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK												-
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Meningkatnya Layanan data statistik sektoral yang terintegrasi	Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi	(Jumlah bidang data sektoral yang sudah terupdate : Jumlah bidang data) x 100%				86%	Rp 146.625.000	DAU/AP BD		1 Sistem	161.287.500
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi	Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi	Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi pada tahun ke n				32 Data	Rp 146.625.000	DAU/AP BD		32 Data	161.287.500
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral yang disusun pada tahun n				12 dokumen	Rp 42.425.000				
					<i>Pembayaran upah TKB</i>	1	Dinas Kominfo	12 dokumen	Rp 24.000.000	DAU/AP BD		12 dokumen	26.400.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
												en	000
					Updating konten Satu Data Lumajang	2	Dinas Kominfo	12 dokumen	Rp 4.800.000	DAU/AP BD		12 dokumen	5.280.000
					Penyusunan buku saku data statistik sektoral kabupaten	3	Dinas Kominfo	100 eks	Rp 12.500.000	DAU/AP BD		200 eks	13.750.000
					Penyusunan laporan bulanan, semester dan tahunan Data Statistik Sektoral Dinas Kominfo	4	Dinas Kominfo	15 dokumen	Rp 1.125.000	DAU/AP BD		15 dokumen	1.237.500
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun pada tahun n	Rapat asistensi penyusunan metadata statistik sektoral	1	Dinas Kominfo	32 Dokumen	Rp 2.800.000	DAU/AP BD		32 Dokumen	3.080.000
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Jumlah Operator Portal Satu Data Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS pada tahun n	Bimtek statistik sektoral	1	Dinas Kominfo	40 Orang	Rp 1.400.000	DAU/AP BD		28 Orang	1.540.000
2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Berkembangnya Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik		Pembangunan sistem data warehouse	1	Dinas Kominfo	1 unit	Rp 100.000.000	DAU/AP BD		1 unit	110.000.000
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya penggunaan sandi dalam pengamanan informasi Perangkat Daerah	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	(Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah : Jumlah Perangkat Daerah) x 100 %				60%	Rp 27.321.500	DAU/AP BD		100%	30.053.650
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan	(Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi : Jumlah Perangkat				75%	Rp 14.743.000	DAU/AP BD		100%	16.217.300

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
			Informasi	Daerah) x 100%									
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi Pada tahun n				5 PD	Rp 14.743.000	DAU/AP BD		16.217.300	
					Bongkar Tower	1		1 Unit	Rp 7.171.000	DAU/AP BD			
					Bimtek Pengelolaan CSIRT Kabupaten	2		70 orang	Rp 7.572.000	DAU/AP BD	49 PD	8.329.200	
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya perangkat daerah yang menggunakan Pola Hubungan Komunikasi Sandi	Persentase PD yang menerapkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi	(Jumlah PD yang menerapkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi: Jumlah Perangkat Daerah) x 100%				60%	Rp 12.578.500	DAU/AP BD		100% 13.836.350	
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi pada tahun n				30 PD	Rp 12.578.500	DAU/AP BD			
					Optimalisasi penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1	Lumajang	49 PD	Rp 3.300.000	DAU/AP BD	49 PD	3.630.000	
					Sosialisasi jaring komunikasi sandi terhadap PD	2	Lumajang	70 Orang	Rp 9.278.500	DAU/AP BD	30 PD	10.206.350	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program Utama

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2024 terdiri dari beberapa Program Utama sedangkan untuk mencapai sasaran dilaksanakan melalui kegiatan – kegiatan sebagaimana yang terurai di bawah ini :

Tabel 4.1 Program Utama dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2024

No	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 2. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
2.	Program Aplikasi Informatika	1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 2. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah
3.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah
4.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota 2. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4.2 Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran yang ingin dicapai/ dihasilkan dari Rencana Kerja ini adalah dalam jangka waktu satu tahun. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang
Tahun 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
				Rp 7.818.783.304	
Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran		100%	Rp 3.916.458.914	DAU/APBD
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		100%	Rp 12.870.000	DAU/APBD
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Menyusun Dokumen Renstra, Dokumen P Renstra, Dokumen Renja, Dokumen P Renja	4 Dokumen	Rp 2.850.000	DAU/APBD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan dokumen Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	Rp 2.400.000	DAU/APBD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Menyusun Dokumen Perubahan RKA SKPD, Dokumen Pergeseran RKA SKPD	2 Dokumen	Rp 2.530.000	DAU/APBD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Menyusun Laporan LKjIP Tahunan, Laporan	5 Laporan	Rp 1.030.000	DAU/APBD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LKjIP TW I, Laporan LKjIP TW II, Laporan LKjIP TW III, Laporan LKjIP TW IV			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Menyusun Laporan Evaluasi Renja TW 1, TW II, TW III, TW IV/Laporan Evaluasi Interim TW I, II,III,IV/Laporan IKM Semester I, Semester II	10 Laporan	Rp 4.060.000	DAU/APBD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	Rp 2.709.953.926	DAU/APBD
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat Gaji dan tunjangan Bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei Juni, Juli Agt, Sep, Okt, Nop, Des	24 Orang/bulan	Rp 2.649.127.926	DAU/APBD
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Menyusun Dokumen pelaksanaan tugas ASN Bulan Januari, Peb, Maret, Apr, Mei, Juni, Juli, Agt, Sep, Okt, Nop, Des,	12 DOKUMEN	Rp 52.728.000	DAU/APBD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Menyusun LO, LRA, Neraca, LPE, CALK	1 Laporan	Rp 1.978.000	DAU/APBD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan keuangan bulanan, dan Laporan semester	12 Laporan	Rp 6.120.000	DAU/APBD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah		100%	Rp 5.345.000	DAU/APBD
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan penatausahaan BMD Bulan Januari sd Desember	12 laporan	Rp 5.345.000	DAU/APBD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD		100%	Rp 133.600.000	DAU/APBD
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Menyusun Dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian Bulan Januari, Feb, Maret, Apr, Mei, Juni, Juli, Agt, Sep, Okt, Nop, Des,	12 Dokumen	Rp 3.600.000	DAU/APBD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		25 orang	Rp 130.000.000	
		Bimtek implementasi sistem manajemen informasi dan komunikasi	25 orang	Rp 130.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah		100%	Rp 332.797.988	DAU/APBD
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	Rp 8.414.688	DAU/APBD
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 paket	Rp 77.719.550	
		Pembelian barang pakai habis alat tulis kantor	1 paket	Rp 67.382.550	DAU/APBD
		Pembelian barang pakai habis alat kebersihan dan bahan pembersih	1 paket	Rp 8.337.000	DAU/APBD
		Pembelian barang pakai habis penyediaan materai	2 paket	Rp 2.000.000	DAU/APBD
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Paket Penyediaan barang cetakan serta	2 Paket	Rp 28.871.250	DAU/APBD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
	yang Disediakan	proses penggandaan			
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Pembelian/ penyediaan bahan bakar mesin dan pelumas	2 paket	Rp 4.072.500	DAU/APBD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	Rp 213.720.000	
		Fasilitasi pelaksanaan dinas luar daerah dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi skpd	12 Laporan	Rp 187.380.000	DAU/APBD
		Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi skpd		Rp 13.500.000	
		Fasilitasi pelaksanaan dinas dalam daerah dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi skpd		Rp 12.840.000	DAU/APBD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD		100%	Rp -	DAU/APBD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp 464.852.000	DAU/APBD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	Rp 216.500.000	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
		Pembayaran tagihan listrik kantor utama, Radio Suara Lumajang dan 3 unit videotron	12 Laporan	Rp 180.000.000	DAU/APBD
		Pembayaran tagihan air (Radio)		Rp 600.000	DAU/APBD
		Pembayaran Lisensi zoom meeting		Rp 3.500.000	DAU/APBD
		Pembayaran Paket Data Internet (orbit zoom meeting)		Rp 2.400.000	DAU/APBD
		Pembayaran tagihan telepon (kantor dan persandian)		Rp 15.600.000	DAU/APBD
		Paket data opsional (10 orang)		Rp 14.400.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	Rp 248.352.000	
		Pembayaran gaji tkb (sekretariat) (9 org)	12 Laporan	Rp 184.800.000	DAU/APBD
		Pembayaran premi asuransi kesehatan bagi non asn.		Rp 56.760.000	DAU/APBD
		Pembayaran premi asuransi ketenagakerjaan bagi non asn.		Rp 6.192.000	DAU/APBD
		Pembayaran jasa pengolahan sampah,		Rp 600.000	DAU/APBD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
		pembayaran iuran pengolahan sampah.			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100%	Rp 257.040.000	DAU/APBD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		18 unit	Rp 182.350.000	
		Pembelian BBM dan pelumas untuk kendararan dinas dan kendaraan operasional atau lapangan	1 Unit	Rp 104.250.000	DAU/APBD
		Pembayaran jasa service kendaraan dinas dan kendaraan operasional atau lapangan	4 Unit	Rp 65.000.000	DAU/APBD
		Pembayaran pajak kendaraan bermotor STNK roda 2 kendaraan operasional atau lapangan;	14 Unit	Rp 2.800.000	DAU/APBD
		Pembayaran pajak STNK kendaraan bermotor roda 4 kendaraan operasional atau lapangan;	1 unit kendaraan dinas, 3 unit kendaraan operasiona	Rp 10.000.000	DAU/APBD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
			1		
		Pembayaran jasa kir kendaraan operasional atau lapangan	4 Unit	Rp 300.000	DAU/APBD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Pembayaran jasa pemeliharaan genset	1 Unit	Rp 7.190.000	DAU/APBD
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		86 unit	Rp 67.500.000	
		Pemeliharaan peralatan 25 unit personal computer dan penggantian suku cadang.	25 unit	Rp 17.500.000	DAU/APBD
		Pemeliharaan pendingin ruangan 15 unit	15 Unit	Rp 9.000.000	DAU/APBD
		Service kamera dan Drone (pembelian alat kelengkapan publikasi)	26 Unit	Rp 28.000.000	DAU/APBD
		Pemeliharaan peralatan printer/ service printer	20 UNIT	Rp 13.000.000	DAU/APBD
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase PPID yang telah memperbarui informasi publik		100%	Rp 2.474.281.890	DAU/APBD
	Persentase Informasi yang diberitakan		100%		
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah PPID yang telah memperbarui informasi		53 PPID	Rp 2.474.281.890	DAU/APBD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	publik				
	Jumlah Informasi yang diberitakan melalui Media Komunikasi		1200 berita		
Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		2 Dokumen	Rp 14.270.000	
		Sosialisasi Perbup Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah nomor 5 tahun 2017 tentang pembentukan lembaga penyiaran publik lokal radio suara lumajang	2 Dokumen	Rp 3.970.000	DAU/APBD
		Rapat Koordinasi Komite Komunikasi Digital		Rp 10.300.000	DAU/APBD
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik		3 Dokumen	Rp 29.108.000	
		Belanja Gaji TKB		Rp 20.400.000	DAU/APBD
		Penanganan pengelolaan opini publik, aspirasi masyarakat, dan informasi Hoax	3 Dokumen	Rp 2.720.000	DAU/APBD
		Koordinasi pengelolaan pengaduan publik		Rp 3.600.000	DAU/APBD
		Penyusunan bahan tindak lanjut pengaduan		Rp 888.000	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
		publik			
		Monev Pengelolaan pengaduan		Rp 1.500.000	
Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		12 Dokumen	Rp 143.790.000	
		Belanja Upah TKB (5 orang x 12 bulan)		Rp 106.800.000	DAU/APBD
		Peliputan kegiatan Pimpinan dalam rangka pencapaian Program Prioritas Berkelanjutan	12 Dokumen	Rp 36.990.000	DAU/APBD
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		12 Dokumen	Rp 204.250.000	
		Belanja Upah TKB (8 orang x 12 bulan)		Rp 166.800.000	DAU/APBD
		Pendokumentasian kegiatan Pimpinan, dan pembuatan konten media komunikasi publik	12 Dokumen	Rp 37.450.000	DAU/APBD
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		12 Dokumen	Rp 136.212.750	
		Belanja Upah TKB (2 orang x 12 bulan)	12 Dokumen	Rp 42.000.000	DAU/APBD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
		Updating konten informasi komunikasi publik secara berkala		Rp 4.725.000	DAU/APBD
		publikasi kegiatan tematik scr periodik		Rp 7.875.000	DAU/APBD
		Pembuatan dan pemasangan media luar ruang		Rp 66.294.750	DAU/APBD
		Fasilitasi Media Daring Pimpinan (Tim Vidcon)		Rp 15.318.000	DAU/APBD
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik		1 Dokumen	Rp 51.877.000	
		Belanja Gaji TKB	1 Dokumen	Rp 21.600.000	DAU/APBD
		Koordinasi pelayanan informasi publik (Admin PPID Pelaksana)		Rp 13.122.000	DAU/APBD
		Pembinaan standart layanan informasi publik desa		Rp 17.155.000	DAU/APBD
Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media		4 layanan	Rp 1.009.018.000	
		Belanja Upah TKB (2 orang x 12 bulan)	4 layanan	Rp 40.800.000	DAU/APBD
		Honor PPTK		Rp 6.288.000	DAU/APBD
		Kerjasama publikasi dan promosi dengan media Online		Rp 376.000.000	DAU/APBD
		Kerjasama publikasi dan		Rp	DAU/APBD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
		promosi dengan media Cetak		200.000.000		
		Kerjasama publikasi dan promosi dengan media Elektronik (Radio dan Televisi)		Rp 280.000.000		DAU/APBD
		Pemantauan pemberitaan media		Rp 17.330.000		DAU/APBD
		Sarasehan dengan Awak Media		Rp 88.600.000		DAU/APBD
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah dokumen kemitraan dengan pemangku kepentingan		12 Dokumen	Rp 132.426.140		
		Belanja Gaji TKB	12 Dokumen	Rp 21.600.000	DAU/APBD	
		Pelayanan pembayaran honorarium penanggungjawab pengelola keuangan		Rp 4.308.000	DAU/APBD	
		Pembinaan KIM Desa di tiap-tiap kecamatan		Rp 41.530.000	DAU/APBD	
		Pelatihan Desain Grafis Desa Karangrejo		Rp 4.825.000	DAU/APBD	
		Anugrah Pewarta Warga (APW)		Rp 60.163.140	DAU/APBD	
Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Siaran Pers terkait isu terindikasi krisis (Jumpa Pers)	12 Dokumen	Rp 134.230.000	DAU/APBD	
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan		12 Dokumen	Rp 246.100.000		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
Kemitraan Komunitas	Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				
		Belanja Upah TKB (4 Orang x 12 bulan)		Rp 81.600.000	DAU/APBD
		Belanja lembur Siaran Radio		Rp 6.375.000	DAU/APBD
		Belanja Jasa Kantor		Rp 38.900.000	DAU/APBD
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat		Rp 31.500.000	DAU/APBD
		Belanja Barang dan Jasa		Rp 10.800.000	DAU/APBD
		Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12 Dokumen	Rp 9.600.000	DAU/APBD
		Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan		Rp 4.600.000	DAU/APBD
		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		Rp 15.000.000	DAU/APBD
		Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		Rp 15.650.000	DAU/APBD
		Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh		Rp 6.875.000	DAU/APBD
		Belanja Jasa Penyelenggara Acara		Rp 25.200.000	DAU/APBD
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung		15 unit	Rp 373.000.000	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
		Pembelian Alat Kelengkapan Publikasi	14 unit	Rp 173.000.000	DAU/APBD
		Rehab ruang command centre (CC Room)	1 unit	Rp 200.000.000	DAU/APBD
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase terbangunnya website perangkat daerah yang terpadu.		95%	Rp 1.254.096.000	1.060.096.000
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah domain dan sub domain yang dikelola		1 Domain dan 264 Subdomain	Rp 308.420.000	DAU/APBD
Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Mendaftarkan Domain lumajangkab.go.id melalui website domain.go.id	1 Domain	Rp 100.000	DAU/APBD
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Domain dan Subdomain	96 Dokumen	Rp 28.320.000	DAU/APBD
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah		1 unit	Rp 280.000.000	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
Daerah	Daerah				
		Pembayaran IP Publik	256 IP	Rp 10.000.000	DAU/APBD
		Pemeliharaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 unit	Rp 200.000.000	DAU/APBD
		Pengadaan komputer jaringan	2 unit	Rp 70.000.000	
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah terbangunnya sistem elektronik yang terpadu		33 unit	Rp 945.676.000	DAU/APBD
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola		1 Unit	Rp 811.996.000	
		pembayaran upah pegawai analis sistem informasi dan jaringan & teknisi jaringan instalasi	1 Unit	Rp 48.000.000	DAU/APBD
		Pembayaran Honor PPTK		Rp 5.736.000	DAU/APBD
		Pengelolaan pusat data		Rp 758.260.000	DAU/APBD
Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Pertemuan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi keamanan informasi	4 dokumen	Rp 1.200.000	DAU/APBD
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi	Rapat Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Elektronik	27 PD	Rp 5.080.000	DAU/APBD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
	Elektronik				
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan		33 unit	Rp 122.000.000	
		Pembayaran upah pegawai analis sistem informasi dan teknisi produksi multimedia dan web	33 unit	Rp 72.000.000	DAU/APBD
		Pemeliharaan aplikasi Administrasi Perkantoran Secara Elektronik (NADINE)	1 aplikasi	Rp 50.000.000	DAU/APBD
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Rapat koordinasi forum PD smart city	4 dokumen	Rp 1.800.000	DAU/APBD
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Rapat kerja tim verifikator internal evaluasi SPBE Pemkab. Lumajang	6 dokumen	Rp 3.600.000	DAU/APBD
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi		86%	Rp 146.625.000	DAU/APBD
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup	Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi		32 Data	Rp 146.625.000	DAU/APBD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
Daerah Kabupaten/Kota					
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		12 dokumen	Rp 42.425.000	
		Pembayaran upah TKB	12 dokumen	Rp 24.000.000	DAU/APBD
		Updating konten Satu Data Lumajang	12 dokumen	Rp 4.800.000	DAU/APBD
		Penyusunan buku saku data statistik sektoral kabupaten	100 eks	Rp 12.500.000	DAU/APBD
		Penyusunan laporan bulanan, semester dan tahunan Data Statistik Sektoral Dinas Kominfo	15 dokumen	Rp 1.125.000	DAU/APBD
Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Rapat asistensi penyusunan metadata statistik sektoral	32 Dokumen	Rp 2.800.000	DAU/APBD
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Bimtek statistik sektoral	40 Orang	Rp 1.400.000	DAU/APBD
Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Pembangunan sistem data warehouse	1 unit	Rp 100.000.000	DAU/APBD
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat		60%	Rp 27.321.500	DAU/APBD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
	daerah				
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		75%	Rp 14.743.000	DAU/APBD
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		5 PD	Rp 14.743.000	DAU/APBD
		Bongkar Tower	1 Unit	Rp 7.171.000	DAU/APBD
		Bimtek Pengelolaan CSIRT Kabupaten	70 orang	Rp 7.572.000	DAU/APBD
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yang menerapkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi		60%	Rp 12.578.500	DAU/APBD
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi		30 PD	Rp 12.578.500	DAU/APBD
		Optimalisasi penerapan Manajemen Keamanan Informasi	49 PD	Rp 3.300.000	DAU/APBD
		Sosialisasi jaring komunikasi sandi terhadap PD	70 Orang	Rp 9.278.500	DAU/APBD

4.3 Alokasi Anggaran

Jumlah Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp7.818.783.304,-** dengan seluruhnya digunakan untuk Belanja Langsung.

BAB V
PENUTUP

Demikian Rancangan Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2024 yang disusun dan akan dijadikan pedoman dalam menunjang pelaksanaan Tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang.

Pokok-pokok dan rincian kegiatan yang disusun merupakan kelanjutan, peningkatan dan perluasan dari pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya dan mengacu, berpedoman kepada Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang.

Lebih lanjut Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2024 disusun untuk dapat dijadikan pedoman bagi penjabaran tugas dan fungsi oleh segenap jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang dalam rangka mengaktualisasikan Tupoksi yang dibiayai oleh anggaran berbasis kinerja sesuai dengan rencana yang realistis serasi dan berkesinambungan.

Semoga Allah SWT selalu meridhoi apa yang telah termuat dalam Rencana Kinerja Tahun 2024 dan semoga perbuatan kita dicatat sebagai amal ibadah. Amin.

Lumajang, 25 Agustus 2023

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN LUMAJANG


MUSTAQIM, S.H.I. M.A
NIP. 19840518 201101 1 014